



# BKPSDM

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

# RENCANA KERJA (RENJA)

# TAHUN 2023

**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA TAHUN 2022**



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 2023.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 ini sebagai rancangan teknokratik atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan pada Rencana Strategik (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru sesuai dengan visi dan misi Bupati Kotabaru terpilih periode tahun 2021-2026 yang akan dituangkan dalam RPJMD.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru yang dapat kami persembahkan, dengan harapan masukan dan saran serta petunjuk. Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik – baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

Kotabaru, 29 Agustus 2022

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Drs. H. MINGGU BASUKI, MAP  
NIP. 19731115 199302 1 003  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	9
1.4 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	14
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	36
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	39
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ....	46
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	10
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	
4.1 Rumusan Program dan Kegiatan .....	1
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	1



## **DAFTAR TABEL**

- Tabel 2.1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2021
- Tabel 2.2.1 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- Tabel 2.2.2 : Cakupan data di masing masing bidang pada BKPSDM Kabupaten Kotabaru
- Tabel 2.4 : Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
- Tabel 2.5 : Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
- Tabel 3.1 : Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kabupaten Kotabaru
- Tabel 3.2 : Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru
- Tabel 4.1 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024



## **DAFTAR GAMBAR**

- Gambar 1.1 : Bagan alir tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- Gambar 1.2 : Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya (RKPD, Renstra Perangkat Daerah) serta tindak lanjut penyusunan APBD



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang disusun oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru adalah merupakan rencana tahunan yang berjangka 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kotabaru tahun 2023.

Rencana kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia 2021-2026.

Renja Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 memberi gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, Indikator-indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pada akhir tahun anggaran pelaksanaannya dapat diukur.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru selama Tahun Anggaran 2023, dan sebagai pengukur capaian kinerja organisasi baik secara tim, individu maupun institusi wadah organisasi. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi Organisasi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang profesional, bersih dan berwibawa serta sebagai pelayan masyarakat yang terbaik.



Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

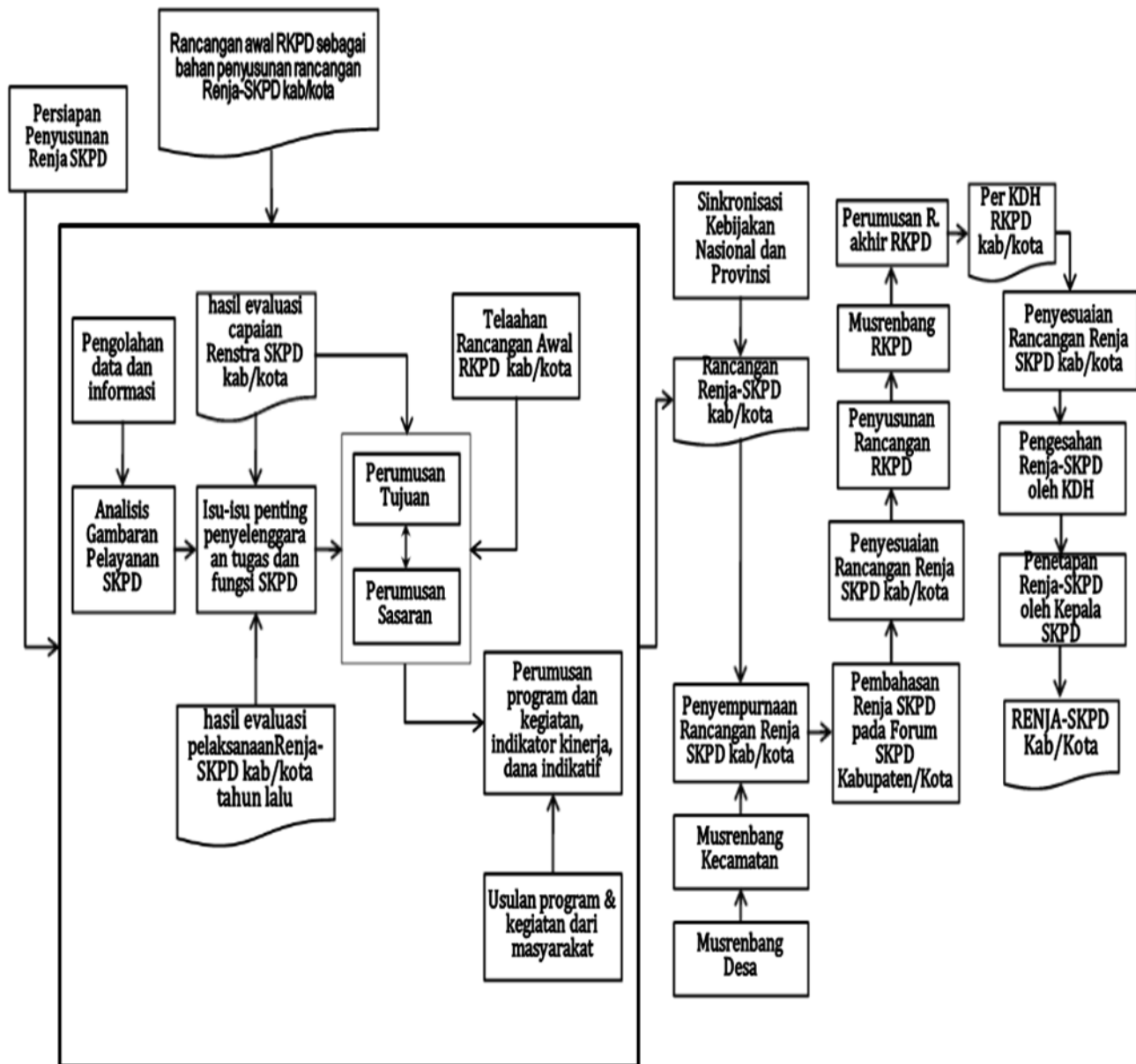
Renja Perangkat Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra Perangkat Daerah, RPJMD dan bahkan RPJPD.

Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk mendukung terwujudnya visi Pemerintah Kabupaten Kotabaru maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru sebagai Sub Sistem dari penyelenggaraan Pemerintah dituntut mampu menjabarkan visi tersebut yang mana setiap tahun diimplementasikan dalam Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 ini sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 yang akan datang.

Bagan alir tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat dari bagan berikut ini.

Gambar 1.1

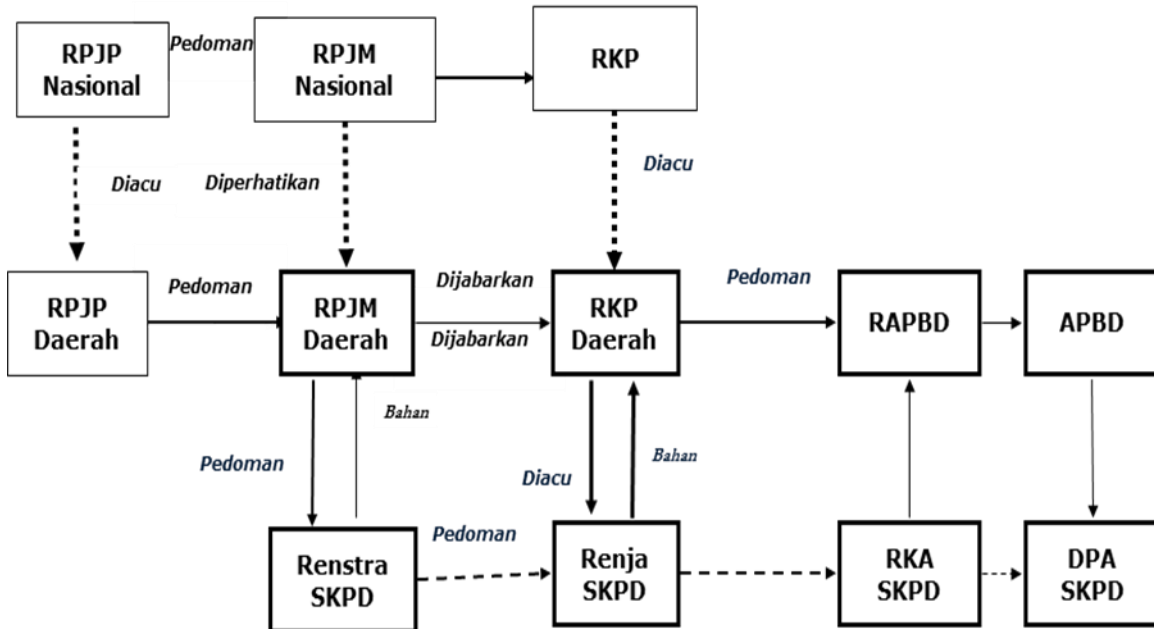
Bagan alir tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah



Keterkaitan Renja dengan dokumen lainnya dapat dilihat dari bagan berikut ini.

Gambar 1.2

keterkaitan antara Renja Perubahan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya (RKPD, Renstra Perangkat Daerah) serta tindak lanjut penyusunan APBD



## 1.2 LANDASAN HUKUM

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 merupakan rencana kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut:

### Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

#### **Peraturan Presiden**

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 16).



### **Peraturan Pemerintah**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)

### **Peraturan Menteri Dalam Negeri**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang



Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496).
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

### **Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan**

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025.



### **Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 05);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 13);

### **Peraturan Bupati**

1. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 40);
2. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 149 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya



Manusia Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 149);

3. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 30);
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 8)

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru tahun 2023.

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Rancangan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) 2021 – 2026 Tahun ke-2.
2. Sebagai acuan pelaksanaan program / kegiatan tahunan yang merupakan pelaksanaan Renstra yang telah ditetapkan.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru;
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru;



3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD); dan
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **KATA PENGANTAR**

#### **DAFTAR ISI**

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

#### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- 4.1 Rumusan Program dan Kegiatan
- 4.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan

#### **BAB V. PENUTUP**



## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

#### 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) yaitu tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yaitu tahun 2022 dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2021 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru mengelola 3 Program, 13 Kegiatan, dan 44 Sub Kegiatan yaitu:

##### 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

###### 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dengan Rincian Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja



## **1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Dengan Rincian Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

## **1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Dengan Rincian Sub Kegiatan :

- a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

## **1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Dengan Rincian Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Bahan Logistiik Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

## **1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Dengan Rincian Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguna Lainnya



## **1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Dengan Rincian Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

## **1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Dengan Rincian Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **2) Program Kepegawaian Daerah**

### **2.1 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Dengan Rincian Sub Kegiatan :

- a. Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN
- b. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
- c. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
- d. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
- e. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
- f. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- g. Pengelolaan Data Kepegawaian



## **2.2 Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN**

Dengan Rincian Sub Kegiatan :

- a. Pengelolaan Promosi ASN
- b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

## **2.3 Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN**

Dengan Rincian Sub Kegiatan :

- a. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
- b. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

## **2.4 Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**

Dengan Rincian Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- b. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
- c. Pembinaan Disiplin
- d. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin
- e. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

### **3) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**

#### **3.1 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis**

Dengan Rincian Sub Kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum

#### **3.2 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**

Dengan Rincian Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional
- b. Penyelenggaraan Pengembangan kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.



## **Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan**

Dari data realisasi 3 program, 13 kegiatan dan 44 sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan ada 9 sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan peralatan dan mesin lainnya ada kesalahan input satuan pengadaan printer di dalam kontrak pengadaan barang
- 2) Paket pengiriman tidak terserap karena sesuai kebutuhan pengiriman
- 3) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dikarenakan belanja tagihan telepon dan listrik dibayar sesuai dengan pemakaian. Dan apabila air PDAM tidak mengalir maka dilakukan pembelian air swadaya
- 4) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, berupa pembayaran perpanjangan pajak dan pengantian flat mobil dinas dananya tidak mencukupi sehingga tidak dapat dilaksanakan
- 5) Pengelolaan promosi ASN berupa rapat baperjakat larangan mutasi berakhir 26 Nopember 2021 dan pelantikan tidak dapat dilaksanakan karena belum mendapat persetujuan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian)
- 6) Fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional berupa tidak dilaksanakannya pelantikan jabatan fungsional karena PPK/Bupati belum dilantik sampai pertengahan tahun sehingga proses PNS yang ditempatkan/mutasi pelaksana/fungsional/mutasi luar dan dalam daerah kabupaten kotabaru terhambat. Dan tidak adanya pelaksanaannya pelatihan jabatan fungsional dikarenakan adanya pamdemi Covid 19.
- 7) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN pada kegiatan rapat Majelis Kode Etik belum terealisasi dikarenakan kasus pelanggaran kode etik tidak ada.



- 8) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum berupa penyelenggaraan diklat teknis terkendala karena sarana dan prasarana tidak mendukung dan juga adanya Pandemi Covid 19.
- 9) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan berupa Pelaksanaan PKN Tk. II, PKA, PKP, Latsar CPNS dilaksanakan secara zoom meeting, sehingga anggaran perjalanan dinas sebagian tidak terealisasi, dan penyelenggaraan diklat fungsional sebagian batal terdampak Covid 19.
  - a. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;  
Terdapat 35 Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :
    1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
    4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    5. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    6. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
    7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
    9. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
    10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
13. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
14. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
15. Fasilitas Kunjungan Tamu
16. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD
17. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
18. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
20. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
21. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
22. Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN
23. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
24. Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK
25. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
26. Fasilitas Lembaga Profesi ASN
27. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
28. Pengelolaan Data Kepegawaian
29. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
30. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
31. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
32. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
33. Pembinaan Disiplin ASN
34. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
35. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional



b. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang belum mencapai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Terdapat 9 Sub Kegiatan belum mencapai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  5. Pengelolaan Promosi ASN
  6. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
  7. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
  8. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
  9. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
- c. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan;
- 1) Sehubungan pandemi Covid-19 menyebabkan Pembatasan pelaksanaan diklat fungsional yang diselenggarakan di luar kabupaten sehingga tidak jadi dilaksanakan.
  - 2) Larangan mutasi dan pelantikan tidak dapat dilaksanakan karena belum mendapat persetujuan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian)



- 3) Pelantikan jabatan fungsional karena PPK/Bupati belum dilantik sampai pertengahan tahun sehingga proses PNS yang ditempatkan/mutasi pelaksana/fungsional/mutasi luar dan dalam daerah kabupaten kotabaru terhambat. Dan tidak adanya pelaksanaannya pelatihan jabatan fungsional dikarenakan adanya pandemi Covid 19.
- d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra;  
Terdapat program kegiatan yang melebihi target dari capaian program renstra yang perlu disesuaikan dalam capaian renstra.
- e. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
  - 1) Dilakukannya evaluasi secara berkala terkait serapan target fisik dan target keuangan setiap kegiatan
  - 2) Dilakukannya koordinasi dan konsolidasi dengan pihak penyelenggara diklat dan pengembangan kompetensi lainnya secara intensif agar diperoleh penjadwalan pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur daerah.
  - 3) Sebagai lembaga teknis pengelola kepegawaian agar meningkatkan konsultasi dengan pejabat pembina kepegawaian daerah untuk percepatan penyelesaian dokumen kepegawaian sesuai SOP yang telah ditentukan.
  - 4) Mengoptimalkan penggunaan media Teknologi Informasi untuk koordinasi dan pengembangan kompetensi pegawai sehubungan kondisi Pandemi yang terjadi di Indonesia.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra dapat dilihat pada lampiran tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2021.



**TABEL 2.1**  
**REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2021 KABUPATEN KOTABARU**

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTABARU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra ) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2021)							
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %						
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)						
<b>NON URUSAN</b>																
X	XX	01														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>																
X	XX	01	2.01													
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																
X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	5	dokumen	Jumlah 5	dokumen	100,00		dokumen	5	dokumen	100,00
X	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang disusun	4	dokumen	Jumlah 4	dokumen	100,00		dokumen	4	dokumen	100,00
X	XX	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	6	dokumen	Jumlah 6	dokumen	100,00		dokumen	6	dokumen	100,00
X	XX	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>											
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	26	Kali pembayaran	Jumlah 26	Kali pembayaran	100,00		Kali pembayaran	26	Kali pembayaran	100,00
X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang terbayarkan	12	Kali pembayaran	Jumlah 12	Kali pembayaran	100,00		Kali pembayaran	12	Kali pembayaran	100,00
X	XX	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun	24	Kali pembayaran	Jumlah 24	Kali pembayaran	100,00		Kali pembayaran	24	Kali pembayaran	100,00
X	XX	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	dokumen	Jumlah 1	dokumen	100,00		dokumen	1	dokumen	100,00
X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun	1	dokumen	Jumlah 1	dokumen	100,00		dokumen	1	dokumen	100,00
X	XX	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>											
X	XX	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang diselenggarakan	3	Kali	Jumlah 3	Kali	100,00		Kali	3	Kali	100,00
X	XX	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											
X	XX	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6	kali penyediaan	Jumlah 6	kali penyediaan	100,00		kali penyediaan	6	kali penyediaan	100,00
X	XX	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	24	kali penyediaan	Jumlah 12	kali penyediaan	100,00		kali penyediaan	12	kali penyediaan	50,00
X	XX	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	13816	Kali	Jumlah 13816	Kali	100,00		Kali	13.816	Kali	100,00
X	XX	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6	kali penyediaan	Jumlah 6	kali penyediaan	100,00		kali penyediaan	6	kali penyediaan	100,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Kode	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra ) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2021)			
						Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %		
X XX 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12	kali penyediaan		12	kali penyediaan	12	kali penyediaan	100,00	12	kali penyediaan	100,00
X XX 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu yang disediakan	12	bulan		12	bulan	12	bulan	100,00	12	bulan	100,00
X XX 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	105	kali		105	kali	13	kali	12,38	13	kali	12,38
X XX 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>										-		
X XX 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	17	jenis/unit		25	jenis/unit	24	jenis/unit	96,00	24	jenis/unit	141,18
X XX 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	9	jenis/unit		10	jenis/unit	1	jenis/unit	10,00	1	jenis/unit	11,11
X XX 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										-		
X XX 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang tersedia	4527	surat		2035	surat	2001	surat	98,33	2.001	surat	44,20
X XX 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	73	kali pembayaran		65	kali pembayaran	53	kali pembayaran	81,54	53	kali pembayaran	72,60
X XX 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	115	kali pembayaran		112	kali pembayaran	112	kali pembayaran	100,00	112	kali pembayaran	97,39
X XX 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										-		
X XX 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	72	kali		72	kali	72	kali	100,00	72	kali	100,00
X XX 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	1	kali		1	kali	1	kali	100,00	1	kali	100,00
X XX 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	46	kali		41	kali	41	kali	100,00	41	kali	89,13
X XX 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	35	kali		26	kali	26	kali	100,00	26	kali	74,29
5 03	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)</b>										-		
5 03 02	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>										-		
5 03 02 2.01	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>										-		
5 03 02 2.01 01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1	dokumen		1	dokumen	1	dokumen	100,00	1	dokumen	100,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra ) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2021)			
			Target Renja	Realisasi Renja		Tingkat Realisasi %	Realisasi capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %					
5 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	dokumen		1	dokumen	100,00		dokumen	1	dokumen	100,00
5 03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	kali		1	kali	100,00		kali	1	kali	100,00
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	100	berkas		130	berkas	100,00		berkas	130	berkas	130,00
5 03 02 2.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	12	kali		6	kali	100,00		kali	6	kali	50,00
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	dokumen		1	dokumen	100,00		dokumen	1	dokumen	100,00
5 03 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Pengelolaan Data Kepegawaian	12	kali		4	kali	100,00		kali	4	kali	33,33
5 03 02 2.02	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>												
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	3	kali		3	kali	100,00		kali	3	kali	100,00
5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Pengelolaan Promosi ASN	4	kali		9	kali	44,44		kali	4	kali	100,00
5 03 02 2.03	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>												
5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	15	orang		15	orang	100,00		orang	15	orang	100,00
5 03 02 2.03 14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	900	SK		900	SK	43,78		SK	394	SK	43,78
5 03 02 2.04	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>												
5 03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8	kali		8	kali	100,00		kali	8	kali	100,00
5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	1	kali pelaksanaan		1	kali pelaksanaan	100,00		kali pelaksanaan	1	kali pelaksanaan	100,00
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Pembinaan Disiplin ASN	40	kali		3	kali	100,00		kali	3	kali	7,50
5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	25	kasus		25	kasus	68,00		kasus	17	kasus	68,00
5 03 02 2.04 09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	15	kasus		14	kasus	100,00		kasus	14	kasus	93,33
5 04	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENDIDIKAN DAN PELATIHAN)</b>												
5 04 02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>												
5 04 02 2.01	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>												
5 04 02 2.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	55	Orang		72	Orang	6,94		Orang	5	Orang	9,09



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra ) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2021)									
						Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %								
5	04	02	2.02																
5	04	02	2.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Jumlah Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	1	dokumen		1	dokumen	1	dokumen	100,00		dokumen	1	dokumen	100,00
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	245	Orang		190	Orang	173	Orang	91,05		Orang	173	Orang	70,61



## 2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Perangkat Daerah Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru. Keberhasilan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan.

Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada lampiran tabel 2.2.1.



**TABEL 2.2.1**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN				REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI	Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah layanan penerbitan surat pengantar kartu taspen			5	0	0	0	0	0	0		perubahan prosedur layanan taspen langsung berurusan ke taspen
2	Jumlah layanan penerbitan surat pengantar kartu Pegawai			66	66	66	66	43	24	125		
3	Jumlah layanan pengajuan usul piagam penghargaan SLKS 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun			287	287	287	287	300	269	249		
4	Jumlah Layanan penerbitan surat pengantar kartu suami (karsu) dan kartu isteri (karis)			123	123	123	123	152	138	31		
5	Melaksanakan Diklat Manajemen Usaha bagi PNS yang purna tugas (Diklat Purna Tugas)			-	-	-	-	-	-	-		
6	Jumlah Layanan pengajuan izin cuti											
	a. Izin cuti tahunan			63	63	63	63	441	500	390		
	b. Izin cuti besar			1	1	1	1	66	13	33		
	c. Izin cuti sakit			5	4	4	4	25	42	46		
	d. Izin cuti bersalin			33	33	30	30	50	43	47		
	e. Izin cuti karena alasan penting			62	62	62	62	41	65	55		
	f. Izin cuti diluar tanggungan negara			-	-	-	-	-	-	-		
7	Jumlah Layanan Pengajuan izin PNS untuk melakukan proses perkawinan			3	3	3	3	-	-	-		
8	Jumlah Layanan pengajuan izin PNS untuk melakukan proses perceraian			5	4	4	4	14	18	9		
9	Jumlah Layanan pengajuan izin PNS untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa			3	3	3	3	1	-	8		
10	Jumlah Layanan pengajuan izin PNS untuk mencalonkan diri sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa			1	1	1	1	-	-	-		



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN				REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI	Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
11	Jumlah Layanan penerbitan surat pengantar pensiun PNS											
	a. Pensiun BUP			36	36	36	36	159	157	65		
	b. Pensiun atas permintaan sendiri			12	12	12	12	9	10	9		
	c. Pensiun Janda/ Duda/ Yatim			8	5	5	5	30	45	14		
	d. Pensiun dipercepat sakit/ keuzuran			1	1	1	1	-	-	2		
	e. Pensiun Anumerta/ tewas dalam tugas			1	1	1	1	-	1	-		
12	Jumlah Layanan penerbitan surat pengantar pengajuan cetak ke-2 dan perbaikan konversi NIP			-	-	-	-	-	-	-		
13	Jumlah Layanan penerbitan surat pengantar kartu pegawai elektronik (KPE)			-	-	-	-	-	-	-		
14	Jumlah Layanan kenaikan pangkat PNS			803	803	803	803	478	910	366		
15	Jumlah Layanan penerbitan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala			1760	1760	1760	1760	2128	2435	991		
16	Jumlah layanan usul pencantuman gelar PNS			30	30	30	30	27	24	22		
17	Jumlah Layanan usul ujian dinas tingkat I dan tingkat II			20	20	20	20	37	80			
18	Jumlah Layanan usul peninjauan masa kerja (PMK)			20	20	20	20	9	27	23		
19	Jumlah layanan pemindahan/mutasi PNS atas permohonan sendiri											
	a. Pindah Tugas PNS Mutasi internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru			15	15	15	15	63	117	121		
	b. Pindah Tugas PNS mutasi keluar lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru			8	8	5	5	8	5	4		
	c. Pindah tugas PNS mutasi dari luar lingkungan Pemerintah kabupaten Kotabaru			1	1	1	1	4	3	8		
20	Jumlah Layanan pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Tertentu											
	a. Pengangkatan JF melalui perpindahan JF yang serumpun maupun beda rumpun			1	1	1	1	-	3	-		
	b. Pengangkatan kembali karena dalam waktu 1 tahun sejak dibebaskan sementara dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan			1	1	1	1	-	-	-		
	c. Pengangkatan kembali karena ditugaskan secara penuh diluar JF (ybs diangkat dalam jabatan struktural eselon)			2	2	2	2	-	-	-		
	d. Pembebasan Sementara karena ditugaskan secara penuh diluar JF (ybs diangkat dalam jabatan struktural eselon)			1	1	1	1	-	-	-		



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN				REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI	Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
	e. Tunjangan Jabatan Fungsional karena perubahan Peraturan Presiden			35	35	35	35	4	18	13		
	f. Pengangkatan kembali karena ditugaskan secara penuh diluar JF/mutasi keluar daerah			-	-	-	-	-	-	-		
	g. Pembebasan sementara karena mengikuti tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan			5	2	5	5	2	-	1		
	h. Pembebasan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit selama 5 (lima) tahun			1	1	1	1	-	-	-		
	i. Pemberhentian dari JF karena alasan kesehatan			-	-	-	-	1	-	-		
	j. Pemberhentian dari JF karena dalam waktu 6 (enam) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit			4	4	4	4	-	-	-		
	k. Pengangkatan dalam JF jenjang utama			1	1	1	1	-	-	-		
	l. Pengangkatan dalam JF melalui inpassing			1	1	1	1	-	6	-		
	m. Pengangkatan JF melalui perpindahan dari JFU menjadi JFT			1	1	1	1	-	-	-		
	n. Pengangkatan kembali karena selesai mengikuti tugas belajar			5	5	5	5	5	3	3		
	o. Pengangkatan pertama kali dalam JF melalui formasi CPNS			15	15	15	15	6	189	41		
	p. Penyesuaian JF tingkat Terampil menjadi JF tingkat ahli			22	20	20	20	6	2	3		
	q. Penyesuaian kenaikan Jabatan Fungsional			100	100	100	100	101	171	97		
21	Jumlah layanan penempatan PNS setelah tugas belajar			1	1	1	1	6		5		
22	Jumlah layanan Penunjukan PNS tugas belajar			10	10	10	10	6	62	2		
23	Jumlah layanan usul perbaikan SK			13	2	7	7	-		1		
24	Jumlah layanan PNS izin belajar			30	30	30	30	5	7	2		
25	Jumlah layanan usul pengangkatan CPNS menjadi PNS			80	80	80	80	232	-	133		
26	Jumlah layanan penawaran diklat ke SKPD dan penerbitan surat perintah mengikuti diklat			3	10	7	7	-	-	16		
27	Jumlah layanan penerbitan surat panggilan diklat Prajabatan Golongan I,II,III			75	75	75	75	188	133	1		
28	Jumlah layanan penerbitan surat panggilan diklat Kepemimpinan tingkat II,III,IV			16	16	16	16	11	24	4		



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Cakupan data masing-masing bidang di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru dapat dilihat pada lampiran tabel 2.2.2



**TABEL DATA 2.2.2.1**  
**CAKUPAN DATA BIDANG DISIPLIN, KESEJAHTERAAN DAN INFORMASI**

NO	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
<b>1</b>	<b>HUKUMAN DISIPLIN RINGAN</b>					
-	TEGURAN LISAN	-	-	-	-	-
-	TEGURAN TERTULIS	-	-	10	3	-
-	PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>HUKUMAN DISIPLIN SEDANG</b>					
-	PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA UNTUK PALING LAMA 1 TAHUN	-	-	-	-	-
-	PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT UNTUK PALING LAMA 1 TAHUN	1	-	-	-	-
-	PENURUNAN PANGKAT PADA PANGKAT YANG SETINGKAT LEBIH RENDAH UNTUK PALING LAMA 1 TAHUN	-	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>HUKUMAN DISIPLIN BERAT</b>					
-	PENURUNAN PANGKAT PADA PANGKAT YANG SETINGKAT LEBIH RENDAH UNTUK PALING LAMA 3 TAHUN	-	-	1	-	-
-	PEMBEBASAN JABATAN	1	-	-	-	-
-	PEMINDAHAN DALAM RANGKA PENUNDAAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH	-	-	-	-	-
-	PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT UNTUK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS	5	-	-	-	-
-	PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGAI PNS	2	11	-	-	-
	<b>JENIS HUKUMAN DISIPLIN BERDASARKAN PP 94 TAHUN 2021</b>					
-	PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 12 BULAN	-	-	-	-	-
-	PEMBEBASAN DARI JABATANNYA MENJADI JABATAN PELAKSANA SELAMA 12 BULAN	-	-	-	-	-
-	PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS	-	-	-	-	-
	<b>JENIS HUKUMAN BERDASARKAN PP 11 TAHUN 2017</b>					
-	PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI PNS YANG DITAHAN KARENA MENJADI TERSANGKA TINDAK PIDANA	-	-	-	2	3
-	PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA	-	-	-	1	-
-	PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA/PENYELEWENGAN	-	-	-	-	1



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

**TABEL DATA 2.2.2.1.1**  
**CAKUPAN DATA BIDANG DISIPLIN, KESEJAHTERAAN DAN INFORMASI**

NO	JENIS PELAYANAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	KARTU PEGAWAI	91	84	43	24	125
2	KARTU SUAMI	63	61	78	59	15
3	KARTU ISTERI	62	84	74	79	16
4	KARTU TASPEN	6	-		-	-
5	CUTI :					
	- CUTI TAHUNAN	304	297	441	500	390
	- CUTI BESAR	50	66	66	13	33
	- CUTI SAKIT	26	43	25	42	46
	- CUTI BERSALIN	35	9	50	43	47
	- CUTI ALASAN PENTING	47	41	41	65	55
	- CUTI PERNIKAHAN	-	-	-	-	-
6	SK SUMPAAH DAN JANJI PNS	112	-	-	-	140

**TABEL DATA 2.2.2.1.2**  
**CAKUPAN DATA BIDANG DISIPLIN, KESEJAHTERAAN DAN INFORMASI**

NO	JENIS PELAYANAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	SATYA LANCAKANA KARYA SATYA					
	- 10 TAHUN	201	208	211	197	173
	- 20 TAHUN	59	86	40	32	38
	- 30 TAHUN	59	67	49	40	38
2	SK IJIN PERNIKAHAN	21	26	9	-	-
3	SK IJIN PERCERAIAN	13	19	14	18	9



**TABEL 2.2.2.1.3**  
**DATA BIDANG DISIPLIN, KESEJAHTERAAN DAN INFORMASI**  
**DATA PNSD KABUPATEN KOTABARU BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN**  
**TAHUN 2018- 2022**

NO	TINGKAT	TAHUN									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	D-1	11	14	6	5	5	5	4	4	4	4
2	D-2	301	243	213	142	202	133	164	102	153	98
3	D-3/sarmud	184	444	158	396	144	389	131	394	129	393
4	D-4	46	14	38	44	37	45	39	56	37	54
5	S-1	824	804	1009	1065	980	1058	1058	1168	1038	1160
6	S-2	141	46	196	79	188	77	184	84	178	84
7	S-3	2		4		4		2		2	
8	sarmud										
9	SD	63	3	49	3	46	2	36	1	35	1
10	SLTA	777	417	669	333	630	319	510	249	51	5
11	SLTP	83	12	67	10	64	9	53	5	492	245
JUMLAH		2432	1997	2409	2077	2300	2037	2181	2063	2119	2044
		4429		4486		4337		4244		4163	



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

**TABEL 2.2.2.2**  
**CAKUPAN DATA BIDANG PENGADAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR**

NO	JENIS DIKLAT	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	DIKLAT PIM					
	- TINGKAT II	-	-	-	27	-
	- TINGKAT III	5	4	-	162	10
	- TINGKAT IV	8	9	11	176	-
2	DIKLAT PRAJABATAN					
	- GOLONGAN I DAN II	75	31	6	21	3
	- GOLONGAN III	5	13	182	112	-
3	CALON PRAJA IPDN YANG MENDAFTAR	-	0	0	-	-
4	CALON PRAJA IPDN YANG LULUS SELEKSI	-	-	-	-	-
5	DIKLAT TEKNIS YANG DIKUTI ( BKPSDM Penyelenggara)	40	121	116	-	-
6	DIKLAT TEKNIS ( Instansi Luar Penyelenggara)	14	52	15	16	28
7	DIKLAT FUNGSIONAL ( Instansi Luar Penyelenggara)	-	21	1	9	8

**TABEL 2.2.2.1**  
**CAKUPAN DATA BIDANG PENGADAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR**

NO	JENIS DIKLAT	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	SK TUGAS BELAJAR					
	- D3	-	-		-	-
	- S1 / D IV	1	10	4	2	-
	- S2	4	7	2	5	2
	- S3	-	-		-	-
2	IZIN BELAJAR					
	- PAKET C	-	-	34	2	-
	- D3	-	-	7	-	-
	- S1	2	15	229	42	-
	- S2	4	5	37	18	2
	- S3	-	-	1	-	-
3	JUMLAH PELAMAR CPNS	-	2.541	-	-	-
4	JUMLAH CPNS LULUS ADMINISTRASI	-	2.120	-	-	-
5	JUMLAH CPNS LULUS SELEKSI	-	-	275	-	-
6	JUMLAH CPNS YANG DITEMPATKAN	-	-	132	-	3



**TABEL 2.2.2.3**  
**DATA BIDANG MUTASI DAN OPROMOSI**  
**DATA PNSD KABUPATEN KOTABARU YANG MENERIMA SK KENAIKAN PANGKAT**  
**TAHUN 2018 - 2022**

NO	TINGKAT	TAHUN									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		PERIODE APRIL	PERIODE OKTOBER	PERIODE APRIL	PERIODE OKTOBER	PERIODE APRIL	PERIODE OKTOBER	PERIODE APRIL	PERIODE OKTOBER	PERIODE APRIL	PERIODE OKTOBER
1	GOLONGAN I	7	8	14	9	4	2	11	3	4	
2	GOLONGAN II	103	109	177	78	72	28	175	43	71	
3	GOLONGAN III	118	290	331	161	196	130	439	165	271	
4	GOLONGAN IV	21	47	57	21	41	20	42	32	20	
<b>JUMLAH</b>		<b>249</b>	<b>454</b>	<b>579</b>	<b>269</b>	<b>313</b>	<b>180</b>	<b>667</b>	<b>243</b>	<b>366</b>	<b>0</b>
		<b>703</b>		<b>848</b>		<b>493</b>		<b>910</b>		<b>366</b>	

**TABEL 2.2.2.3.1**  
**DATA BIDANG MUTASI DAN PROMOSI**  
**DATA PNS KABUPATEN KOTABARU YANG MENERIMA SK GAJI BERKALA**  
**TAHUN 2018 - 2022**

NO	KETERANGAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	GOLONGAN I	18	28	39	24	17
2	GOLONGAN II	284	379	518	522	175
3	GOLONGAN III	581	964	1200	1460	596
4	GOLONGAN IV	191	453	371	429	203
<b>JUMLAH</b>		<b>1074</b>	<b>1824</b>	<b>2128</b>	<b>2435</b>	<b>991</b>



**TABEL 2.2.2.3.2**  
**DATA BIDANG MUTASI DAN PROMOSI**  
**DATA PNS KABUPATEN KOTABARU BERDASARKAN BATAS USIA PENSIUN**  
**TAHUN 2021-2025**

NO	GOLONGAN	TAHUN									
		2021		2022		2023		2024		2025	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	GOLONGAN I	-	-	3	-	2	-	3	-	3	-
2	GOLONGAN II	12	3	11	1	9	2	15	7	12	3
3	GOLONGAN III	55	16	40	8	32	20	24	20	29	25
4	GOLONGAN IV	68	31	61	27	49	25	64	21	32	44
<b>JUMLAH</b>		<b>125</b>	<b>50</b>	<b>115</b>	<b>36</b>	<b>92</b>	<b>47</b>	<b>106</b>	<b>48</b>	<b>76</b>	<b>72</b>
		<b>175</b>		<b>151</b>		<b>139</b>		<b>154</b>		<b>148</b>	

**TABEL 2.2.2.3.3**  
**DATA BIDANG MUTASI DAN PROMOSI**  
**DATA PNS KABUPATEN KOTABARU YANG MENERIMA SK PENSIUN**  
**TAHUN 2018- 2022**

NO	KETERANGAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	PENSIUN NORMAL	93	115	159	157	65
2	PENSIUN JANDA	28	22	25	37	13
3	PENSIUN DUDA	8	8	5	8	1
4	PENSIUN DINI	10	9	9	10	9
5	PENSIUN KEUJURAN	1	1	-	0	2
6	PENSIUN ANUMERTA	-	-	-	1	-
<b>JUMLAH</b>		<b>140</b>	<b>155</b>	<b>198</b>	<b>213</b>	<b>90</b>

**TABEL 2.2.2.3.4**  
**DATA BIDANG MUTASI DAN PROMOSI**  
**TAHUN 2018- 2022**

NO	JENIS DATA	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
	DATA MUTASI:					
	ke luar pemkab Kotabaru					
1	- KE KEMENTERIAN DALAM NEGERI	1	-	-	-	-
2	- KE PROVINSI	2	5	4	3	8
3	- KAB/ KOTA	9	19	8	5	-
4	- LUAR PROVINSI	1	2	8	5	4
	ke lingkungan pemkab Kotabaru					
5	- Provinsi/ Kab Kota	2	2	4	1	1
6	- PEGAWAI PUSAT MENJADI PNSD	2	2	-	1	-
7	Mutasi Internal	-	133	63	117	121



**TABEL 2.2.2.3.5**  
**DATA BIDANG MUTASI DAN PROMOSI**  
**DATA PNS KABUPATEN KOTABARU BERDASARKAN PETA JABATAN**  
**TAHUN 2021-2022**

NO	ESELON	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		FORMASI	TERISI	KOSONG	FORMASI	TERISI	KOSONG
1	II / A	1	1	0	1	1	0
2	II / B	34	27	7	34	24	10
3	III / A	65	44	21	65	50	15
4	III / B	122	97	25	122	102	20
5	IV / A	506	345	161	256	189	67
6	IV / B	69	37	32	69	36	33
		<b>797</b>	<b>551</b>	<b>246</b>	<b>547</b>	<b>402</b>	<b>145</b>



**TABEL 2.2.2.4**  
**DATA UMUM BKPSDM KABUPATEN KOTABARU**

**1. Data Kepegawaian**

a. Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

No	Golongan	SD	SLTP	SLTA	D.1	D.2	D.3	S.1	S.2	Jumlah
1	IV	0	0	0	0	0	0	0	2	2
2	III	0	0	0	0	0	0	20	3	23
3	II	0	0	3	0	0	3	4	0	10
4	I	1	0	0	0	0	0	0	0	1
5	NON PNS	0	0	4	0	0	1	4	0	9
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>28</b>	<b>5</b>	<b>45</b>

b. Berdasarkan Jabatan dan Eselon

No	Jabatan	Eselon	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Badan	II/b	1	
2	Sekretaris	III/a	1	
3	Kepala Bidang	III/b	3	
4	Kepala Sub Bidang / Bagian	IV/a	2	
5	Jabatan Fungsional		7	
6	Jabatan Fungsional Tertentu		4	
7	Pelaksana		18	

c. Diklat - diklat / Bimtek yang telah diikuti oleh SDM di BKPSDM Kab. Kotabaru

No	Diklat Yang Diikuti	Jumlah	Lama Diklat/ Bimtek	Keterangan
1	Pelatihan Fungsional Analisis Kepegawaian Angkatan I	1 Orang	13 Hari	Tahun 2018
2	Pelatihan Penyusunan Renja dan Renstra	2 Orang	3 Hari	Tahun 2019
3	Pelatihan Manajemen Kearsipan berbasis IT	1 Orang	3 Hari	Tahun 2019
4	Pelatihan Fungsional Analisis Kepegawaian	1 Orang	13 Hari	Tahun 2020
5	Pelatihan Fungsional Assessor SDM Aparatur	1 Orang	30 Hari	Tahun 2021



**TABEL 2.2.2.5**  
**DATA TENAGA NON PNS (TNP) KABUPATEN KOTABARU**

No	SKPD & KECAMATAN	TAHUN		
		2020	2021	2022
1	Sekretariat Daerah	85	90	62
2	Inspektorat	6	5	4
3	Sekretariat DPRD	30	28	18
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	29	28	27
5	Dinas Kesehatan	69	67	37
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	113	108	40
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	11	9	8
8	Dinas PP, PA, PP dan KB	35	33	30
9	Dinas Lingkungan Hidup	101	106	15
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	63	61	41
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12	12	13
12	Dinas Perhubungan	34	31	29
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	18	17	17
14	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	76	74	25
15	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	15	14	12
16	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	35	34	34
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	26	25	23
18	Dinas Perikanan	34	32	26
19	Dinas Pertanian	36	33	30
20	Satpol PP dan Damkar	54	52	54
21	Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertanahan	12	11	9
22	Dinas Ketahanan Pangan	14	14	12
23	Dinas Sosial	7	6	5
24	Bappeda	21	16	17
25	BPKAD	26	26	23
26	Badan Pendapatan Daerah	12	11	11
27	BKPSDM	15	15	9
28	Badan Kesbangpol	7	7	7
29	BPBD	10	10	9
30	RSU Pangeran Jaya Sumitra	104	100	81
31	Kec. Kelumpang Utara	3	3	5
32	Kec. Kelumpang Barat	2	2	3
33	Kec. Kelumpang Tengah	2	2	1
34	Kec. Kelumpang Hulu	3	3	2
35	Kec. Kelumpang Hilir	3	4	3
36	Kec. Kelumpang Selatan	1	1	1
37	Kec. Sampanahan	1	1	2
38	Kec. Sungai Durian	2	2	2
39	Kec. Hampang	3	3	4
40	Kec. Pamukan Selatan	3	3	4
41	Kec. Pamukan Utara	1	0	
42	Kec. Pamukan Barat	1	2	3
43	Kec. Pulau Sebuku	3	3	2
44	Kec. Pulau sembilan	4	4	4
45	Kec. Pulaulaut Utara	8	9	8
46	Kec. Pulaulaut Timur	2	2	2
47	Kec. Pulaulaut Barat	1	1	1
48	Kec. Pulaulaut Selatan	2	2	4
49	Kec. Pulaulaut Tengah	2	2	5
50	Kec. Pulaulaut Kepulauan	5	5	5
51	Kec. Pulaulaut Sigam	8	9	9
<b>JUMLAH</b>		<b>1170</b>	<b>1138</b>	<b>798</b>



## 2. Data Perlengkapan dan Aset

### a. Jenis dan Jumlah Perlengkapan dan Aset

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Tahun Kepemilikan
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
1	AC Split	1	1	0	0	2012
2	Gelas Tamu	2	2	0	0	2012
3	Gorden	1	1	0	0	2012
4	Jaringan SAPK	1	1	0	0	2012
5	Karpet	1	1	0	0	2012
6	Lap Top	5	5	0	0	2012
7	Lemari Kayu	3	3	0	0	2012
8	Mouse + Keyboard	1	1	0	0	2012
9	Pagar Parkir	1	1	0	0	2012
10	Printer	3	3	0	0	2012
11	Rak Buku	3	3	0	0	2012
12	Rak Helm	2	2	0	0	2012
13	Rak Sound System	1	1	0	0	2012
14	Rak TV	1	1	0	0	2012
15	Struktur BKD	1	1	0	0	2012
16	Televisi LCD	1	1	0	0	2012
17	Tempat Kue	1	1	0	0	2012
18	Teralis	4	4	0	0	2012
19	UPS	1	1	0	0	2012
20	AC	1	1	0	0	2013
21	Anjungan BKD	1	1	0	0	2013
22	Buku Perpustakaan	1	1	0	0	2013
23	Dispenser	2	2	0	0	2013
24	DUK	1	1	0	0	2013
25	Gorden Vertical	1	1	0	0	2013
26	Komputer Lap Top	6	6	0	0	2013
27	Komputer PC	4	4	0	0	2013
28	Kulkas	1	1	0	0	2013
29	Kursi Kerja Biasa	5	5	0	0	2013
30	Kursi Komputer	4	4	0	0	2013
31	Kursi Tamu	1	1	0	0	2013
32	Lemari Aluminium	1	1	0	0	2013
33	Meja Kerja	5	5	0	0	2013
34	Meja Komputer	4	4	0	0	2013
35	Mesin Ketik	1	1	0	0	2013
36	Printer Dot Matrik	1	1	0	0	2013
37	Printer Injek	5	5	0	0	2013
38	Struktur BKD	1	1	0	0	2013
39	UPS	4	4	0	0	2013



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Tahun Kepemilikan
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
40	Vacum Clenner	1	1	0	0	2013
41	AC Split	2	2	0	0	2014
42	Kursi Pejabat Eselon IV	11	11	0	0	2014
43	Gorden	1	1	0	0	2014
44	Meja Pejabat Eselon IV	11	11	0	0	2014
45	Lemari Arsip	1	1	0	0	2014
46	Kursi Kerja Biasa	60	60	0	0	2014
47	Meja Komputer	60	60	0	0	2014
48	Printer	2	2	0	0	2014
49	Printer Monochrome	1	1	0	0	2014
50	Lemari Mushola	1	1	0	0	2014
51	Lemari Loker	1	1	0	0	2014
52	Kursi Lipat	14	14	0	0	2014
53	Kursi Stanles	2	2	0	0	2014
54	LCD TV	1	1	0	0	2014
55	Alat Pendingin AC	7	7	0	0	2014
56	Komputer PC	60	60	0	0	2014
57	TV LCD 42 Inchi	1	1	0	0	2014
58	Printer	4	4	0	0	2014
59	Printer Monochrome	1	1	0	0	2014
60	Printer Besar	1	1	0	0	2014
61	UPS	60	60	0	0	2014
62	Faximilie	1	1	0	0	2014
63	Gelas	1	1	0	0	2014
64	Gelas Tamu	5	5	0	0	2014
65	Tempat Kue	1	1	0	0	2014
66	CCTV	1	1	0	0	2014
67	Genset	1	1	0	0	2014
68	AC Split	2	2	0	0	2014
69	AC Split 2 PK	4	4	0	0	2014
70	Buku Perpustakaan	1	1	0	0	2014
71	Sekat Ruangan Kantor	1	1	0	0	2015
72	Pintu Utama Kantor	1	1	0	0	2015
73	PC All in one	5	5	0	0	2015
74	PC All in one (Besar)	1	1	0	0	2015
75	UPS	3	3	0	0	2015
76	Scanner	1	1	0	0	2015
77	Batterai Lapotop	5	5	0	0	2015
78	Server	1	1	0	0	2015
79	Lemari Arsip Diklat	3	3	0	0	2015
80	Lemari Arsip Kepangkatan	1	1	0	0	2015



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Tahun Kepemilikan
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
81	Lemari Arsip Umpeg	1	1	0	0	2015
82	Gordyn	1	1	0	0	2015
83	Karpet lantai	1	1	0	0	2015
84	Taplak Meja	1	1	0	0	2015
85	Sound System	1	1	0	0	2015
86	Kursi Tamu	2	2	0	0	2015
87	Lemari Sound System	1	1	0	0	2015
88	Lemari Arsip Pejabat	1	1	0	0	2015
89	Papan Visual	1	1	0	0	2015
90	Papan data Kepegawaian	1	1	0	0	2015
91	Papan Struktur BKD	1	1	0	0	2015
92	Blender	1	1	0	0	2015
93	tangga Aluminium	1	1	0	0	2015
94	Disvenser	2	2	0	0	2015
95	TV Plasma	1	1	0	0	2015
96	Buku Perpustakaan	1	1	0	0	2015
97	Genset	1	1	0	0	2015
98	Jaringan LAN	1	1	0	0	2015
99	Mesin Fotocopy dengan kertas double Folio	1	1	0	0	2016
100	Mesin Absensi	1	1	0	0	2016
101	Penghancur Kertas	1	1	0	0	2016
102	Meja Reseptionis	1	1	0	0	2016
103	Kursi Tamu	2	2	0	0	2016
104	Moubiler lainnya/ Tulisan dinding	1	1	0	0	2016
105	Moubiler lainnya/ Rumah Ginset	1	1	0	0	2016
106	Kursi Kerja	6	6	0	0	2016
107	Dinding/ Sekat Plastik	1	1	0	0	2016
108	Karpet	1	1	0	0	2016
109	AC Split1/2 PK	1	1	0	0	2016
110	AC Split 1 PK	1	1	0	0	2016
111	Kipas Angin	1	1	0	0	2016
112	Alat Dapur lain	1	1	0	0	2016
113	Televisi LCD	1	1	0	0	2016
114	Panel	1	1	0	0	2016
115	Sarung Komputer	1	1	0	0	2016
116	Teralis Besi	1	1	0	0	2016
117	P.C Unit Komputer PC	1	1	0	0	2016
118	Printer	5	5	0	0	2016
119	UPS	2	2	0	0	2016
120	Rouner	1	1	0	0	2016



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Tahun Kepemilikan
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
121	HUB	1	1	0	0	2016
122	RJ-45	2	2	0	0	2016
123	Plug-Book	2	2	0	0	2016
124	Crimping Tool	1	1	0	0	2016
125	Tester	1	1	0	0	2016
126	Klem Kabel	20	20	0	0	2016
127	Radio Acces Point	4	4	0	0	2016
128	Wireles LAN	1	1	0	0	2016
129	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1	0	0	2016
130	Meja Kerja	6	6	0	0	2016
131	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	8	8	0	0	2016
132	Encyclopedia,Kamus, Buku Referensi	7	7	0	0	2016
133	Buku Agama Islam	3	3	0	0	2016
134	Buku Ekonomi	3	3	0	0	2016
135	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	2	2	0	0	2016
136	Mesin Absensi	58	58	0	0	2017
137	Mesin Absensi	44	44	0	0	2018
138	Printer	7	7	0	0	2018
139	UPS	3	3	0	0	2018
140	Mouse	1	1	0	0	2018
141	Lap Top	3	3	0	0	2018
142	Note Book	1	1	0	0	2018
143	Hard Disk Internal	1	1	0	0	2018
144	Komputer PC	2	2	0	0	2018
145	Monitor Komputer	1	1	0	0	2018
146	Kursi Esselon III	2	2	0	0	2018
147	Lemari Kaca	5	5	0	0	2018
148	Meja Kerja	1	1	0	0	2018
149	Kursi Esselon IV	2	2	0	0	2018
150	Keyboard dan mouse	9	9	0	0	2018
151	UPS	23	23	0	0	2018
152	Kabel Power dan Adaptor	6	6	0	0	2018
153	Alat Pemadam	2	2	0	0	2018
154	AC	2	2	0	0	2018
155	Buku Manajemen Kinerja	1	1	0	0	2019
156	Buku Undang Undang ASN Aparatur	1	1	0	0	2019
157	Buku Pengadaan Barang / Jasa	1	1	0	0	2019
158	Buku Belajar Singkat PHP 7	1	1	0	0	2019
159	Buku Komputer Grafik / Design	1	1	0	0	2019
160	Buku Sakti Kuasai Exsel	1	1	0	0	2019



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Tahun Kepemilikan
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
161	Buku Iktisar Bahasa Tubuh	1	1	0	0	2019
162	Mesin Absen dan Perlengkapannya	0	0	0	0	2019
163	LAN (Lokal Area Network)	2	2	0	0	2019
164	Personal Komputer Lain-Lain (RJ45Ubility)	1	1	0	0	2019
165	Adapter PC	4	4	0	0	2019
166	Kabel Power Adapter PC	6	6	0	0	2019
167	Keyboard	2	2	0	0	2019
168	UPS	6	6	0	0	2019
169	Mouse	5	5	0	0	2019
170	Server	1	1	0	0	2019
171	Router	1	1	0	0	2019
172	Mesin Absen	8	8	0	0	2020
173	Batteray Mesin Absen	10	10	0	0	2020
174	Adaptor Mesin Absen	10	10	0	0	2020
175	UPS	1	1	0	0	2020
176	Kabel LAN	1	1	0	0	2021
177	RJ-45 Cat6	1	1	0	0	2021
178	RJ-45 Cat5e	2	2	0	0	2021
179	Switch/HUB	2	2	0	0	2021
180	Hard Disk Server	1	1	0	0	2021
181	Layar Monitor	1	1	0	0	2021
182	Ram Server	2	2	0	0	2021
183	Eksternal Portabel Harddisk	1	1	0	0	2021
184	Wireless Access Point	5	5	0	0	2021
185	AC Split 1 PK	4	4	0	0	2021
186	AC Split 2 PK	1	1	0	0	2021
187	Kipas Angin	3	3	0	0	2021
188	Proyektor Viewer	1	1	0	0	2021
189	Mikropon	3	3	0	0	2021
190	Kamera Digital	1	1	0	0	2021
191	Printer	1	1	0	0	2021
192	UPS	10	10	0	0	2021
193	Laptop Server	1	1	0	0	2021
194	Scanner	2	2	0	0	2021
195	Handphone	1	1	0	0	2021
196	Laptop	2	2	0	0	2021
197	Printer Desks Jet	1	1	0	0	2021
198	scanner	1	1	0	0	2021
199	Lampu Dekoratif	1	1	0	0	2021
<b>Total</b>		<b>827</b>	<b>827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



### 3. Data- data Terkait Hasil Pekerjaan

#### a. Kegiatan yang dilaksanakan

No	Kegiatan yang dilaksanakan	Bagian / Bidang	Keterangan
1	Diklat Prajabatan	Pengembangan Kompetensi Aparatur	
2	Diklat Kepemimpinan	Pengembangan Kompetensi Aparatur	
3	Diklat Teknis dan Kepemimpinan	Pengembangan Kompetensi Aparatur	
4	Pengiriman PNS Tugas Belajar Utusan Pemkab Kotabaru	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	
5	Pemberian Ijin Belajar	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	
6	Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	
7	Rapat Tim MPPHD	Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	
8	Rapat Tim Evaluasi Kinerja PNS	Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	
9	Training Bintal	Sekretariat	
10	Penyelenggaraan Konseling Pegawai	Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	
11	Out Bound	Sekretariat	
12	Pemeriksaan Kesehatan Bagi PNS	Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	
13	Verifikasi Karis, Karsu, Karpeg dan Taspen	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	
14	Verifikasi Satya Lencana Karya Satya	Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	
15	Sumpah / Janji PNS	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	
16	Asistensi Sistem Kinerja Pegawai	Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	
17	Pelantikan Pejabat Struktural	Mutasi dan Promosi	
18	Rapat Tim Baperjakat dan Sekretariat Baperjakat	Mutasi dan Promosi	
19	Assessment PNS	Mutasi dan Promosi	
20	Pengelola Fasilitasi PNS Pindah Tugas	Mutasi dan Promosi	
21	Seleksi Penerimaan CPNS	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	
22	Penempatan PNS	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	
23	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	
24	Pengangkatan dan Pemindehan Pegawai ASN	Mutasi dan Promosi	
25	Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah	Mutasi dan Promosi	
26	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Mutasi dan Promosi	
27	Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas	Mutasi dan Promosi	
28	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	
29	Penyelenggaraan Kenaikan Pangkat ASN	Mutasi dan Promosi	
30	Pelayanan Administrasi Kepegawaian Satu Pintu	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	



**b. Daftar Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati**

No	Judul Perda / Perbup	Nomor Perda/Perbup	Tanggal	Bagian/Bidang
1	Tata Cara , Persyaratan Pemberian Ijin Belajar,dan Pemberian Kuasa Penandatanganan Surat Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah	55 Tahun 2012	01 Mei 2012	Pengembangan Pegawai
2	Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Periode 2012-2015	42 Tahun 2012	03 Februari 2012	Pengembangan Pegawai
3	Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon II dan Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	59 Tahun 2012	15 Juni 2012	Pengembangan Pegawai
4	Pemberian Tunjangan kesejahteraan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	31 Tahun 2013	17 Juni 2013	Kedudukan Hukum & Kesejahteraan Pegawai
5	Upah Bulanan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	188.45/770/KUM/2013	31 Desember 2013	Kedudukan Hukum & Kesejahteraan Pegawai
6	Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	31 Tahun 2013	31 Desember 2013	Kedudukan Hukum & Kesejahteraan Pegawai
7	Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional	21 Tahun 2014	19 Maret 2014	Kepangkatan dan Pensiun
8	Perubahan atas Peraturan Bupati Kotabaru No 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembeian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah	14 Tahun 2015	30 Januari 2015	Pengembangan Pegawai
9	Perubahan atas Peraturan Bupati Tentang Keputusan Bupati Kotabaru tentang Upah Bulanan Tenaga Non PNS Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	30 Tahun 2015	06 Juli 2015	Kedudukan Hukum & Kesejahteraan Pegawai
10	Upah Bulanan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	188.45.796.KUM Tahun 2015	31 Desember 2015	Kedudukan Hukum & Kesejahteraan Pegawai
11	Perubahan atas Keputusan Bupati Kotabaru tentang Upah Bulanan Tenaga Non PNS	188.45.187.KUM Tahun 2016	07 Januari 2016	Kedudukan Hukum & Kesejahteraan Pegawai
12	Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	28 Tahun 2016	24 Oktober 2016	Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
13	Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintahan kabupaten Kotabaru	68 Tahun 2016	27 oktober 2016	Pengembangan Pegawai
14	Tata Cara Perolehan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kotabaru	69 Tahun 2016	07 Nopember 2016	Kepangkatan dan Pensiun
15	Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/796/KUM/2015 tentang Upah Bulanan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	188.45/011/KUM/2017	16 Januari 2017	Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
16	Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 29 Tahun 2011 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi PNS Tugas Belajar dan Ijin Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	8 Tahun 2017	Januari 2017	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
17	Disiplin Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	27 Tahun 2017	6 Oktober 2017	Kepangkatan dan Pensiun
18	Keputusan Bupati kotabaru Tentang Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Mengikuti	188.45/062/KUM/2018	30 Januari 2018	Pengembangan Kompetensi Aparatur



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Judul Perda / Perbup	Nomor Perda/Perbup	Tanggal	Bagian/Bidang
19	Keputusan Bupati kotabaru Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Angkatan Pertama Utusan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018	188.45/344/KUM/2018	5 Maret 2018	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
20	Peraturan Bupati tentang pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	17 Tahun 2019	25 Pebruari 2019	Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
21	Keputusan Bupati Kotabaru Tentang Pembentukan tim penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil daerah Kabupaten Kotabaru	188.45/376/KUM/2019	30 April 2019	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
22	Peraturan Bupati Kotabaru tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	107 Tahun 2020	09 Juli 2020	Pengadaan dan Pengembangan Aparatur
23	Peraturan Bupati tentang pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	137 Tahun 2020	23 September 2020	Disiplin, Kesejahteraan dan Informasi

## 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan Isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah masih belum Optimalnya Kinerja ASN dan Belum optimalnya pelayanan administrasi kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Didapat dari Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan Manajemen Perangkat Daerah yaitu Belum tercapainya kinerja pembangunan disebabkan Aspek ketersediaan SDM Aparatur.

Faktor penyebab masalah yaitu:

1. Kurangnya jumlah aparatur/PNS pada satuan kerja perangkat daerah
2. Kompetensi PNS yang belum memadai
3. Penempatan ASN tidak sesuai Kompetensi

Upaya yang sudah dilakukan yaitu:

1. Pengadaan ASN baru
2. Peningkatan Kompetensi ASN melalui kegiatan Diklat, Bimtek, Pemagangan dan Lomba
3. Uji Kompetensi pelaksanaan ASN

Pada Program Nasional pada agenda Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, yang ditandai dengan: terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien; meningkatkan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi; diimplementasikannya UU Aparatur Sipil Negara secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah; dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.



Tantangan yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru selaras dengan program nasional yaitu Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain:

- Penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi;
- Penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
- Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.



**TABEL 2.3**  
**ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

No.	Isu Strategis	Permasalahan / Hambatan	Dampak	Tantangan dan Peluang	Tindak Lanjut	
1	masih belum Optimalnya Kinerja ASN dan Belum optimalnya pelayanan administrasi kepegawaian	1	Kurangnya jumlah aparatur/PNS pada satuan kerja perangkat daerah	Berkurangnya efektifitas kinerja pegawai terhadap tanggung jawab pekerjaannya  Tantangan : Adanya moratorium dari Pemerintah Pusat ditambah dengan jumlah pensiun tahunan pegawai Peluang : Pendistribusian pegawai secara merata melalui jalur mutasi	1	Pengadaan ASN baru
		2	Kompetensi PNS yang belum memadai	Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai bidang  Tantangan : Mengikutsertakan PNS pada Diklat Teknis/ Fungsional/Bimtek/ Lokakarya, Workshop dan Seminar Peluang : PNS dituntut untuk memenuhi standar kompetensi sesuai di bidang tugas	2	Peningkatan Kompetensi ASN melalui kegiatan Diklat, Bimtek, Pemagangan dan Lomba
		3	Penempatan ASN tidak sesuai Kompetensi	Belum optimalnya pelaksanaan tugas PNS  Tantangan : Adanya peningkatan daya saing bagi PNS dalam pengembangan karier Peluang : Menugaskan PNS untuk ikut Uji Kompetensi (UKOM)	3	Uji Kompetensi pelaksanaan ASN



**Tabel 2.4**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**  
**Kabupaten Kotabaru**

**SKPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

No	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5		6	7	8		9
	<b>BELANJA</b>		<b>BELANJA</b>			<b>45.741.776.815</b>	<b>BELANJA</b>			<b>45.741.776.815</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>					<b>32.837.376.815</b>				<b>31.985.737.465</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas</b>				<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas</b>			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	5	Dokumen	17.010.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	20.500.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun	1	Dokumen	5.000.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	5.000.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD tersusun	1	Dokumen	5.500.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	5.500.000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun	1	Dokumen	5.000.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	5.000.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD tersusun	1	Dokumen	5.500.000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	5.500.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang disusun	8	Dokumen	36.318.600	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	Laporan	15.160.000



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5		6	7	8		9
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	20	Dokumen	58.557.500	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	Laporan	26.920.000
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</b>				<b>Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</b>			
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	26	kali penyediaan	10.241.416.415	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	Orang/Bulan	13.241.416.415
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang terbayarkan	12	kali Penyediaan	20.002.600.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	15.193.950.000
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun	24	Dokumen	600.000.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	587.120.000
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Dokumen	9.175.800	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	5.000.000
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran		Jumlah Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	1	Laporan	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	16	Laporan	10.000.000
13	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun	1	Dokumen	3.250.000	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	3.500.000
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu</b>				<b>Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu</b>			
14	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	55	Stel	33.000.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket	-
15	Pemulangan Pegawai yang Pensiun		Jumlah Pemulangan Pegawai Pensiun terfasilitasi		Kali Pemulangan	-	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	7	Orang	200.000.000



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5		6	7	8		9
16	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		Jumlah Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas yang terfasilitasi		Kali Pemulangan	-	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1	Laporan	300.000.000
17	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang diselenggarakan	3	Kali Sosialisasi	75.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300	Orang	80.000.000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6	Kali Penyediaan	22.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	21.998.000
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	24	Kali Penyediaan	120.000.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	PaketPaket	120.000.000
20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	13816	kali penyediaan	300.000.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13813	Paket	400.000.000
21	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6	kali penyediaan	60.000.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	61.502.450
22	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12	Kali Penyediaan	8.500.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	7.200.000
23	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu yang disediakan	12	Kali Penyediaan	36.000.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	36.000.000
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	110	Kali	370.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110	Laporan	486.330.000
25	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang dikelola	1	Dokumen	25.000.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	25.000.000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</b>				<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</b>			
26	Pengadaan Mebel		Jumlah Pengadaan Mebel yang diadakan	3	Jenis/ Unit	45.000.000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	Unit	15.000.000



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5		6	7	8		9
27	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	30	Jenis/ Unit	265.880.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30	Unit	365.779.800
28	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	9	Jenis/ Unit	56.000.000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9	Unit	52.933.500
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
29	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang tersedia	4527	Kali Penyediaan	26.520.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2035	Laporan	26.519.200
30	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	73	kali Penyediaan	128.600.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	65	Laporan	132.140.600
31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	124	kali penyediaan	68.160.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	112	Laporan	336.960.000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>				<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>			
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	24	kali	89.388.500	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	Unit	103.388.500
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	1	kali	75.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	49.929.000
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	42	kali	23.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	24	Unit	21.830.000
35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	26	kali	21.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26	Unit	18.660.000



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Rancangan Awal RKP			Hasil Analisis kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5		6	7	8		9
	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>					<b>4.504.400.000</b>				<b>5.754.051.350</b>
	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>		<b>Prosentase ASN sesuai Formasi</b>				<b>Prosentase ASN sesuai Formasi</b>			
36	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN		Jumlah Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1	Dokumen	59.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1	Dokumen	50.000.000
37	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	Dokumen	80.900.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	Dokumen	60.000.000
38	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	Kali Pelaksanaan	420.900.000	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	Dokumen	350.808.000
39	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	100	berkas	110.000.000	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	100	Dokumen	110.000.000
40	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		Jumlah Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	6	Kali	15.000.000	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	5	Lembaga	15.000.000
40	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	dokumen	350.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Dokumen	424.113.350
42	Pengelolaan Data Kepegawaian		Jumlah Pengelolaan Data Kepegawaian	6	kali	36.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	100	Dokumen	40.000.000
	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>		<b>Prosentase Layanan Mutasi dan Promosi tepat waktu</b>				<b>Prosentase Layanan Mutasi dan Promosi tepat waktu</b>			
43	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Pengelolaan Mutasi ASN		kali pelaksanaan	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	50	Dokumen	50.000.000
44	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	3	kali pelaksanaan	250.000.000	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	650	Dokumen	260.000.000
45	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Pengelolaan Promosi ASN	10	kali pelaksanaan	503.600.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	200	Dokumen	510.000.000



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5		6	7	8		9
	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>		<b>Prosentase Pengembangan Kompetensi ASN (Pendidikan Lanjutan dan Penempatan Jabatan Fungsional)</b>				<b>Prosentase Pengembangan Kompetensi ASN (Pendidikan Lanjutan dan Penempatan Jabatan Fungsional)</b>			
46	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	20	orang	2.100.000.000	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	20	Orang	3.100.000.000
47	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1000	SK	80.000.000	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	1000	Orang	80.000.000
	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>		<b>Prosentase Kinerja ASN dengan nilai minimal kategori baik</b>				<b>Prosentase Kinerja ASN dengan nilai minimal kategori baik</b>			
48	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8 1	kali sistem	320.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	9	Dokumen	526.480.000
49	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		Jumlah Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	1	kali pelaksanaan	45.000.000	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	200	Orang	50.000.000
50	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah Pembinaan Disiplin ASN	40	kali	77.000.000	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1100	Orang	67.650.000
51	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10	kasus	50.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10	Laporan	50.000.000
52	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		Jumlah Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	10	kasus	7.000.000	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	10	Dokumen	10.000.000
						<b>8.400.000.000</b>				<b>8.001.988.000</b>
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>									
	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>		<b>Prosentase Pemenuhan Kompetensi Teknis ASN</b>				<b>Prosentase Pemenuhan Kompetensi Teknis ASN</b>			
53	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	61	Orang	150.000.000	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	61	Orang	250.000.000



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5		6	7	8		9
	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>		<b>Prosentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial dan fungsional</b>				<b>Prosentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial dan fungsional</b>			
54	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional		Jumlah Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	1	Dokumen	150.000.000	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1	Dokumen	150.000.000
55	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	60	Orang	8.100.000.000	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6	Laporan	7.601.988.000

## 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2023, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk tahun 2023 tidak ada.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023  
Kabupaten Kotabaru

### Perangkat Daerah : BKPSDM Kabupaten Kotabaru

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-



## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selama tahun 2023 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.

#### 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan kebijakan nasional dikaitkan RPJMN 2020-2024 yang disusun oleh Pemerintah. Prioritas nasional berdasarkan ringkasan eksekutif RPJMN 2020 – 2024 antara lain:

1. Pembangunan SDM
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi
5. Transformasi Ekonomi

Dari aspek tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan menuju pada Pemerintahan yang dinamis (*Dynamic Government*), yaitu suatu tata kelola pemerintahan yang responsif atas aspirasi masyarakat, perubahan lingkungan strategis pembangunan yang cepat tanggap dan mampu mengelola perubahan. Selain itu struktur kelembagaan yang lincah (*agile*), yang mampu mengidentifikasi masalah dan/atau peluang, dan langsung mengantisipasi secara cepat dan berkesinambungan, sejalan dengan pembangunan dan mampu merespon isu sesuai dengan arah kebijakan strategis pembangunan. Dari sisi sumber daya manusia (SDM), perlu membangun SDM aparatur pembelajar, dengan menanamkan konsep pola pikir yang mampu berfikir strategis, terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pelaku pembangunan serta masyarakat, dengan berdasarkan sistem merit dan talent management.



Dari sisi pelayanan publik, diharapkan akan terbangun pelayanan publik berkualitas, akuntabel, dan responsif yang dapat memberikan perubahan sosial. Hal ini ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan, terbangunnya portal layanan terpadu baik secara elektronik maupun non elektronik, kanal pengaduan layanan yang efektif dan perbaikan layanan berkala bersama stakeholder (masyarakat dan pelaku usaha).

Untuk itu tata kelola pemerintahan sangat memerlukan prasyarat telah terbangunnya proses bisnis yang efektif, tidak silo, terbuka untuk berkolaborasi antar Pemerintah maupun dengan non Pemerintah. Tata kelola juga akan terus diperbaiki dan di evaluasi secara berkala didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi yang optimal. Selain terkoneksi antar lembaga ditingkat pusat, keterhubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi penting, karena pelaksanaan dari proses bisnis pada tingkat teknis akan membawa dampak positif baik langsung maupun secara tidak langsung pada pelaksanaan program pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Isu strategis dari tata kelola pemerintahan yaitu:

- 1) ASN yang profesional, berintegritas, kreatif, inovatif, dan netral. Terwujudnya ASN yang profesional merupakan salah satu prasyarat untuk dapat mewujudkan birokrasi yang berkinerja tinggi. Untuk itu diperlukan penguatan manajemen ASN yang profesional berbasis sistem merit. Data KASN (2018) menunjukkan bahwa dari 74 instansi pemerintah diketahui bahwa hanya terdapat enam kementerian yang telah memiliki sistem merit "Sangat Baik". Hal ini disebabkan masih lemahnya manajemen ASN di instansi pemerintah khususnya pada pembinaan karier dan manajemen kinerja.
- 2) Kelembagaan dan proses bisnis yang sederhana, responsif, adaptif dan membuka ruang peran serta publik dalam pemerintahan. Perkembangan pembangunan kelembagaan salah satunya ditandai dengan capaian indeks kelembagaan, data KemenPANRB (2018) menunjukkan bahwa 47 K/L, 10 provinsi, 64 kab/kota mendapatkan indeks kelembagaan cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan secara berkelanjutan



untuk meningkatkan efektivitas kelembagaan, antara lain melalui perbaikan proses bisnis, implementasi SPBE dan manajemen kearsipan.

- 3) Pelayanan publik yang berorientasi perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan dengan penerapan standar pelayanan publik yang menyeluruh. Penyelenggaraan pelayanan publik salah satunya ditinjau melalui penerapan standar pelayanan di instansi pemerintah. Data Ombudsman RI (2018) menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2015 s/d 2018 (Kementerian dari 27,27 persen menjadi 55,56 persen; Lembaga dari 20 persen menjadi 25 persen; provinsi 9,09 persen menjadi 62,5 persen; dan kab/kota dari 5,26 persen menjadi 31,6 persen). Capaian tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan percepatan penerapan standar pelayanan publik di seluruh instansi pemerintah. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di diperlukan pengembangan inovasi pelayanan publik dan percepatan penyelesaian pengaduan pelayanan.
- 4) Akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang handal dan efektif serta birokrasi yang beintegritas. Akuntabilitas kinerja instansi ditinjau dari opini BPK atas laporan keuangan instansi dan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Data BPK (2018) menunjukkan adanya peningkatan persentase instansi pemerintah yang mendapatkan Opini WTP atas laporan keuangan dari tahun 2015 s/d 2017 (Kementerian/Lembaga dari 65 persen menjadi 55,56 persen; Provinsi dari 85 persen menjadi 97 persen; Kabupaten dari 54 persen menjadi 72 persen; dan Kota dari 65 persen menjadi 86 persen). Selain itu, data KemenPANRB RB (2018) menunjukkan bahwa persentase instansi pemerintah yang nilai akuntabilitas kerjanya “Baik” ke atas cenderung meningkat dari tahun 2015 s/d 2018 (Kementerian/Lembaga dari 76,62 persen menjadi 92,77 persen; Provinsi dari 50 persen menjadi 94,12 persen; dan Kabupaten/kota dari 8,60 persen menjadi 46,85 persen). Namun demikian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan instansi pemerintah yang transparan, bersih dan akuntabel.



- 5) Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan kualitas manajemen ASN, efektivitas tata laksana, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi seluruh instansi pemerintah.

Arah kebijakan dan strategi dari pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas manajemen ASN melalui :
  - (a) Rencana kebutuhan riil ASN jangka menengah;
  - (b) Rencana pengembangan kompetensi ASN; dan
  - (c) Penyusunan pola karir instansional.
- 2) Peningkatan efektivitas tata kelola instansi pemerintah melalui:
  - (a) Penerapan proses bisnis instansi;
  - (b) Implementasi arsitektur SPBE instansi; dan
  - (c) Penerapan e-Arsip terintegrasi.
- 3) Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui:
  - (a) Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi;
  - (b) Penerapan Zona Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel; dan;
  - (c) Pemenuhan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Instansional.
- 4) Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui:
  - (a) Penerapan (menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan) Standar Pelayanan di Unit Pelayanan Publik (UPP) tertentu;
  - (b) Percepatan penyelesaian pengaduan pelayanan publik;
  - (c) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di UPP tertentu;
  - (d) Pelaksanaan FKP dalam penetapan standar pelayanan publik;
  - (e) Pemutakhiran informasi pada Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP);
  - (f) Integrasi penyelenggaraan pelayanan pusat, daerah, dan BUMN/D.

Kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 pada misi ke dua yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik, dengan tujuan dari misi tersebut adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satu dari sasaran dari tujuan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan strategi yang telah disusun antara lain :

- 1) Terwujudnya kapasitas aparatur pemerintah yang profesional dan pemerintahan yang akuntabel
- 2) Peningkatan pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah
- 3) Peningkatan kualitas manajemen pelayanan public

Untuk mewujudkan capaian dari misi kedua RPJMD, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan tugasnya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah

Kebijakan daerah tentu mengarah kepada kebijakan nasional dan dalam hal ini Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentunya tidak lepas dari kebijakan daerahnya sendiri yaitu Kabupaten Kotabaru dan kebijakan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai acuannya mengarah kepada Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang mana Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Keterjangkauan pelayanan pendidikan dan kesehatan
4. Pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan ekonomi
5. Pengembangan kawasan strategis dan inovasi guna peningkatan daya saing daerah



Untuk Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana prioritas pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2021 ada poin ke 1 yaitu Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yaitu :

**Kebijakan :**

- a. Evaluasi Kinerja lembaga pemerintah Kabupaten Kotabaru, Analisis lembaga Pemerintahan Kabupaten Kotabaru untuk mengetahui lembaga yang perlu ada dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dengan melakukan penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif serta membentuk lembaga Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh , hidup dan berkembang di masyarakat Kabupaten Kotabaru dengan berpijak pada prinsip sedikit struktur kaya fungsi.
- b. Penetapan struktur dan proses kewenangan dan tanggung jawab organisasi secara jelas dan tegas.
- c. Penetapan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab organisasi secara jelas, tegas dan fleksibel.
- d. Rekrutmen, penempatan, promosi, dan mutasi sesuai dengan kualifikasi teknis atau hasil analisis jabatan.
- e. Penataan Aparatur Pemerintah Kabupaten Kotabaru sesuai dengan prinsip *"the right man of right job"*.
- f. Peningkatan kompetensi Aparatur pemerintah Kabupaten Kotabaru.
- g. Penetapan kualifikasi Aparatur (bertaqwa, berakhlak, bersih dan kompeten).
- h. Penegakan disiplin kerja, etika dan profesi aparatur Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
- i. Penempatan Pegawai sesuai dengan Kompetensinya dan Pemerataan Penempatan Aparatur Keseluruh Pedesaan dan Kecamatan.



- j. Sistem pembinaan karir aparatur Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang prospektif.
- k. Pemberian *reward* dan *punishment* aparatur pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggungjawabnya.
- l. Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam mencermati lingkungan internal dan eksternal organisasinya.
- m. Meningkatkan tingkat responsivitas (cepat tanggap dan cepat menanggapi) apa yang menjadi masalah, keluhan dan aspirasi masyarakat serta perubahan lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal.
- n. Merubah sikap dan perilaku aparatur pemerintah menjadi pelayan masyarakat.
- o. Melakukan *efisiensi penyelenggaraan pemerintahan* baik efisiensi sumber daya manusia, efisiensi sarana maupun efisiensi dana.
- p. Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi.
- q. Peningkatan pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan.
- r. Meningkatkan fungsi dan profesionalitas birokrasi daerah sebagai pelayan masyarakat dan pengelola kekayaan daerah.
- s. Melakukan debirokratisasi dalam pelayanan perijinan investasi melalui penyederhanaan sistem dan prosedur melalui pelayanan satu atap/satu pintu.
- t. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.



**Prioritas dan fokus :**

- a. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal
- b. Evaluasi Kinerja lembaga pemerintah Kabupaten Kotabaru
- c. Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif serta berpijak pada prinsip *sedikit struktur kaya fungsi*
- d. Peningkatan disiplin dan profesionalisme Sumber Daya Manusia
- e. Peningkatan Pelayanan Prima
- f. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan dengan selalu menciptakan sistem dan inovasi baru
- g. Pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan pengendalian
- h. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan
- i. Peningkatan Pembinaan Sosial Keagamaan
- j. Pemberian Subsidi warga yang meninggal dunia
- k. Pengelolaan Bebas Biaya KTP dan Akte
- l. Optimalisasi pelaksanaan e-KTP
- m. Penerapan Perda SOTK Baru tindak lanjut UU No 23 Tahun 2014
- n. Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah
- o. Memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan serta peningkatan peluang pihak investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Kotabaru
- p. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS)

- q. Pembangunan kantor UPTD Dinas Pendapatan
- r. Mereformasi manajemen pemungutan dan pengelolaan sumber PAD
- s. Menekan biaya pemungutan Sumber PAD.

Dari uraian diatas RKPD Tahun Anggaran 2023 mengarahkan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk memprioritaskan dan fokus pada poin d, yaitu : Peningkatan Disiplin dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia.

Tabel 3.1.

Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan serta Kabupaten Kotabaru

No	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
A	Nasional	-	-
1.	Peningkatan kualitas manajemen ASN	RPJMN 2020-2024	
2.	Persentase instansi pemerintah yang menyusun rencana kebutuhan ASN jangka menengah	RPJMN 2020-2024	
3.	Persentase instansi pemerintah yang menyusun rencana pengembangan kompetensi ASN	RPJMN 2020-2024	
4.	Persentase instansi pemerintah yang menyusun pola karir instansi	RPJMN 2020-2024	
B	Provinsi		
1	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	Renstra BKD Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021	
2	Pembinaan dan pengembangan aparatur		
3	Penataan aparatur		
4	Peningkatan kualitas sistem informasi manajemen kepegawaian		



### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selama lima tahun.

Tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2023 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada lampiran tabel 3.2.



TABEL 3.2

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTABARU

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target Indikator Kinerja Pada Tahun		satuan
					Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Kinerja ASN	Nilai sasaran kerja pegawai (SKP)	Nilai rata-rata SKP BAIK	Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kompetensi	Persentase jabatan struktural yang diisi sesuai dengan kompetensi	75	80	persen
				Persentase ASN yang memenuhi Standar Kompetensi	25	30	persen
			Meningkatnya disiplin pegawai ASN	Persentase tingkat kedisiplinan ASN	95	100	persen
Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan dan akuntabel	Kualitas Pelayanan Administrasi kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat Baik	Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Indeks Kepuasan PNS terhadap Pelayanan Kepegawaian	85	90	persen



## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 4.1 Rumusan Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program Rutin SKPD terdiri dari 1 Program, 7 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan SKPD
    - f. Evaluasi Perangkat Daerah
    - g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
  - 1.2. Administasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD



- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/  
Triwulanan/Semesteran SKPD
  - f. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi  
Anggaran
- 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- a. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
  - b. Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam  
Melaksanakan Tugas
  - c. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan  
Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah  
Daerah
- a. Pengadaan Mebel
  - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor  
atau Bangunan Lainnya
- 1.6 Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah  
Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan  
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas  
Jabatan



- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Program Prioritas Pembangunan terdiri dari 2 Program 6 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan antara lain :

1. Program Kepegawaian Daerah

1.1 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

- a. Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN
- b. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
- c. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
- d. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
- e. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
- f. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- g. Pengelolaan Data Kepegawaian

1.2 Mutasi dan Promosi ASN

- a. Pengelolaan Mutasi ASN
- b. Pengelolaan Promosi ASN
- c. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

1.3 Pengembangan Kompetensi ASN

- a. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
- b. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

1.4 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- a. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- b. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
- c. Pembinaan Disiplin ASN
- d. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
- e. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai



## 2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

### 2.1 Pengembangan Kompetensi Teknis

- a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintah Umum

### 2.2 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

- a. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, tenaga Pengembangan Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama Pengembangan Kompetensi Pimpinan daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional
- b. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.

Program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru yang direncanakan untuk Periode Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran Tabel 4.1

**Tabel 4.1**  
**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kabupaten Kotabaru**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
5						<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
5	03						37,779,268,915						38,245,538,815							
5	03	01				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP*)	persen		persen	100 persen	31,674,431,015				100 persen	33,527,602,765			
5	03	01	2.01			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*)	persen		persen	100 persen	261,809,000				100 persen	86,580,000			
5	03	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	103,369,000	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Tata Kelola Pemerintahan	BKPSDM Kabupaten Kotabaru	10 Dokumen	21,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Tata Kelola Pemerintahan	BKPSDM Kabupaten Kotabaru	1 Dokumen	5,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5,500,000	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Tata Kelola Pemerintahan	BKPSDM Kabupaten Kotabaru	1 Dokumen	5,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Tata Kelola Pemerintahan	BKPSDM Kabupaten Kotabaru	1 Dokumen	5,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5,500,000	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Tata Kelola Pemerintahan	BKPSDM Kabupaten Kotabaru	1 Dokumen	5,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				32 Laporan	16,360,000	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Tata Kelola Pemerintahan	BKPSDM Kabupaten Kotabaru	32 Laporan	17,160,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kotabaru  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	121,080,000	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Tata Kelola Pemerintahan	BKPSDM Kabupaten Kotabaru	7 Laporan	26,920,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*)	persen		persen	100 persen	<b>28,608,905,415</b>						100 persen	<b>30,257,486,415</b>	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	13,241,416,415	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Tata Kelola Pemerintahan	BKPSDM Kabupaten Kotabaru	55 Orang/bulan	14,241,416,415	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	14,702,208,000	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Tata Kelola Pemerintahan	BKPSDM Kabupaten Kotabaru	12 Dokumen	15,393,950,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	587,120,000	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Tata Kelola Pemerintahan	BKPSDM Kabupaten Kotabaru	12 Dokumen	597,120,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	5,000,000	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Tata Kelola Pemerintahan	BKPSDM Kabupaten Kotabaru	2 Laporan	6,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				16 Laporan	71,200,000	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Tata Kelola Pemerintahan	BKPSDM Kabupaten Kotabaru	16 Laporan	15,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1,961,000	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Tata Kelola Pemerintahan	BKPSDM Kabupaten Kotabaru	1 Dokumen	4,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu*)	persen		persen	100 persen	<b>416,500,000</b>						100 persen	<b>805,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kotabaru  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	101,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Tata Kelola Pemerintahan	ASN Lingkup Kabupaten Kotabaru	100 Paket	120,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.05 06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				7 Orang	98,520,000	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Tata Kelola Pemerintahan	ASN Lingkup Kabupaten Kotabaru	7 Orang	250,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.05 07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				1 Laporan	136,730,000	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Tata Kelola Pemerintahan	ASN Lingkup Kabupaten Kotabaru	1 Laporan	350,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				300 Orang	80,000,000	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Tata Kelola Pemerintahan	ASN Lingkup Kabupaten Kotabaru	300 Orang	85,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>5 03 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*)	persen		persen	100 persen	<b>1,046,072,200</b>						100 persen	<b>1,215,114,200</b>	
5 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	23,198,000	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Tata Kelola Pemerintahan	BKPSDM Kabupaten Kotabaru	6 Paket	21,998,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	58,863,400	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Tata Kelola Pemerintahan	BKPSDM Kabupaten Kotabaru	12 Paket	120,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				13.813 Paket	355,660,600	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Tata Kelola Pemerintahan	BKPSDM Kabupaten Kotabaru	13.813 Paket	447,550,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	54,352,200	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Tata Kelola Pemerintahan	BKPSDM Kabupaten Kotabaru	6 Paket	57,035,700	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kotabaru  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	6,720,000	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Tata Kelola Pemerintahan	BKPSDM Kabupaten Kotabaru	4 Dokumen	7,200,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	36,000,000	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Tata Kelola Pemerintahan	BKPSDM Kabupaten Kotabaru	12 Laporan	36,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1185 Laporan	486,278,000	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Tata Kelola Pemerintahan	BKPSDM Kabupaten Kotabaru	1185 Laporan	500,330,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	25,000,000	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Tata Kelola Pemerintahan	BKPSDM Kabupaten Kotabaru	1 Dokumen	25,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>5 03 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu*)	persen		persen	100 persen	<b>502,089,000</b>						100 persen	<b>433,713,300</b>	
5 03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				45 Unit	46,280,000	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Tata Kelola Pemerintahan	BKPSDM Kabupaten Kotabaru	45 Unit	15,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				39 Unit	419,409,000	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Tata Kelola Pemerintahan	BKPSDM Kabupaten Kotabaru	39 Unit	365,779,800	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				9 Unit	36,400,000	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Tata Kelola Pemerintahan	BKPSDM Kabupaten Kotabaru	9 Unit	52,933,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>5 03 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*)	persen		persen	100 persen	<b>490,100,600</b>						100 persen	<b>495,619,800</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kotabaru  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	7,400,000	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Tata Kelola Pemerintahan	BKPSDM Kabupaten Kotabaru	12 Laporan	26,519,200	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				89 Laporan	145,740,600	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Tata Kelola Pemerintahan	BKPSDM Kabupaten Kotabaru	89 Laporan	132,140,600	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				112 Laporan	336,960,000	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Tata Kelola Pemerintahan	BKPSDM Kabupaten Kotabaru	112 Laporan	336,960,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *)	persen		persen	100 persen	<b>348,954,800</b>						100 persen	<b>234,089,050</b>	
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	146,504,800	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Tata Kelola Pemerintahan	BKPSDM Kabupaten Kotabaru	6 Unit	143,670,050	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	160,000,000	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Tata Kelola Pemerintahan	BKPSDM Kabupaten Kotabaru	1 Unit	49,929,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				39 Unit	23,790,000	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Tata Kelola Pemerintahan	BKPSDM Kabupaten Kotabaru	39 Unit	21,830,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				28 Unit	18,660,000	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Tata Kelola Pemerintahan	BKPSDM Kabupaten Kotabaru	28 Unit	18,660,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Persentase Rekrutment, Penempatan dan Promosi sesuai kompetensi	Persen		Persen	57 Persen	<b>6,104,837,900</b>						57 Persen	<b>4,717,936,050</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kotabaru  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 02 2.01	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	Prosentase ASN sesuai Formasi	persen		persen	57 persen	<b>1,177,370,700</b>						57 persen	<b>1,040,376,350</b>	
5 03 02 2.01 01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Tata Kelola Pemerintahan	ASN Lingkup Kabupaten Kotabaru	1 Dokumen	50,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	60,000,000	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Tata Kelola Pemerintahan	ASN Lingkup Kabupaten Kotabaru	1 Dokumen	60,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	350,808,000	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Tata Kelola Pemerintahan	ASN Lingkup Kabupaten Kotabaru	1 Dokumen	350,808,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				100 Dokumen	160,866,000	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Tata Kelola Pemerintahan	ASN Lingkup Kabupaten Kotabaru	100 Dokumen	110,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				5 Lembaga	14,999,900	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4. Tata Kelola Pemerintahan	ASN Lingkup Kabupaten Kotabaru	5 Lembaga	13,200,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				14 Dokumen	486,151,100	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Tata Kelola Pemerintahan	ASN Lingkup Kabupaten Kotabaru	14 Dokumen	424,113,350	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				2 Dokumen	54,545,700	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Tata Kelola Pemerintahan	ASN Lingkup Kabupaten Kotabaru	2 Dokumen	32,255,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.02	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	Prosentase Layanan Mutasi dan Promosi tepat waktu	persen		persen	100 persen	<b>998,362,000</b>						100 persen	<b>808,600,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kotabaru  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				50 Dokumen	50,000,000	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Tata Kelola Pemerintahan	ASN Lingkup Kabupaten Kotabaru	50 Dokumen	55,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Dokumen	438,362,000	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Tata Kelola Pemerintahan	ASN Lingkup Kabupaten Kotabaru	2 Dokumen	250,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				200 Dokumen	510,000,000	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Tata Kelola Pemerintahan	ASN Lingkup Kabupaten Kotabaru	200 Dokumen	503,600,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.03	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	Prosentase Pengembangan Kompetensi ASN (Pendidikan Lanjutan dan Penempatan Jabatan Fungsional)	persen		persen	1.2 persen	<b>3,215,522,000</b>						1.2 persen	<b>2,180,000,000</b>	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				20 Orang	3,100,000,000	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Tata Kelola Pemerintahan	ASN Lingkup Kabupaten Kotabaru	20 Orang	2,100,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				1000 Orang	115,522,000	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Tata Kelola Pemerintahan	ASN Lingkup Kabupaten Kotabaru	1000 Orang	80,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.04	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	Prosentase Kinerja ASN dengan nilai minimal kategori baik	persen		persen	95 persen	<b>713,583,200</b>						95 persen	<b>688,959,700</b>	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				9 Dokumen	526,480,000	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Tata Kelola Pemerintahan	ASN Lingkup Kabupaten Kotabaru	9 Dokumen	526,480,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				200 Orang	52,673,200	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Tata Kelola Pemerintahan	ASN Lingkup Kabupaten Kotabaru	200 Orang	44,829,700	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kotabaru  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				1100 Orang	60,410,000	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Tata Kelola Pemerintahan	ASN Lingkup Kabupaten Kotabaru	1100 Orang	67,650,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				10 Laporan	74,020,000	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Tata Kelola Pemerintahan	ASN Lingkup Kabupaten Kotabaru	10 Laporan	50,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>5 04</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>							<b>7,962,507,900</b>						<b>9,001,988,000</b>	
<b>5 04 02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	Prosentase Peningkatan Kompetensi ASN	persen		persen	70 persen	<b>7,962,507,900</b>						70 persen	<b>9,001,988,000</b>	
5 04 02 2.01	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	Prosentase Pemenuhan Kompetensi Teknis ASN	persen		persen	1.32 persen	<b>52,493,900</b>						1.32 persen	<b>250,000,000</b>	
5 04 02 2.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				30 Orang	52,493,900	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Tata Kelola Pemerintahan	ASN Lingkup Kabupaten Kotabaru	30 Orang	250,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 02 2.02	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	Prosentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial dan fungsional	persen		persen	19 persen	<b>7,910,014,000</b>						19 persen	<b>8,751,988,000</b>	
5 04 02 2.02 01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun				1 Dokumen	308,026,000	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Tata Kelola Pemerintahan	ASN Lingkup Kabupaten Kotabaru	1 Dokumen	150,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kotabaru  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				20 Laporan	7,601,988,000	Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Tata Kelola Pemerintahan	ASN Lingkup Kabupaten Kotabaru	20 Laporan	8,601,988,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>TOTAL</b>							<b>45,741,776,815</b>						<b>47,247,526,815</b>		



## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan rencana teknokratik Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2023.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru tahun 2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan digunakan dalam penyusunan visi dan misi Bupati Kotabaru periode 2021-2026.

Kotabaru, 29 Agustus 2022

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Drs. H. MINGGU BASUKI, MAP  
NIP. 19731115 199302 1 003  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)